

RINGKASAN

**Rais Aufar : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dan
237410101020 Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Dalam Persidangan
Pidana Umum Melalui Sarana Virtual (Virtual
Courts)
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Jantho
Kabupaten Aceh Besar)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr.
Yusrizal, S.H., MH.)**

Pelaksanaan sidang pidana menggunakan sarana virtual adalah untuk mengikuti perkembangan hidup dimasyarakat dan demi terwujudnya efektifitas dari pelaksanaan sidang pidana di era yang serba digital. Oleh karena itu, dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai salah satu jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Namun faktanya dalam pelaksanaan sidang secara virtual ditemukan adanya berbagai hambatan teknis dan yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kekuatan pembuktian keterangan saksi dan pemenuhan hak-hak terdakwa pada saat dilaksanakannya sidang melalui sarana virtual serta apa saja hambatan dan kendala yang dialami Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jantho.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian Pengadilan Negeri Jantho. Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan penelaahan secara kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa persidangan secara virtual belum dapat dilaksanakan secara sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dalam pelaksanaannya sidang secara elektronik masih ditemukan kurangnya kekuatan pembuktian keterangan saksi dan tidak terpenuhinya hak-hak terdakwa sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulannya pelaksanaannya Persidangan secara virtual ditemukan berbagai persoalan diantaranya kendala yuridis-prosedural dan kendala yuridis-substantif yang terfokus pada prinsip-prinsip due process of law yang belum terpenuhi dalam persidangan virtual. Oleh karena itu disarankan kepada lembaga penegakan hukum agar dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Perppu yang dapat mengatur persidangan pidana secara virtual.

Kata kunci: *Persidangan Vitual, Kekuatan Pembuktian, Hak-Hak Terdakwa.*

SUMMARY

**Rais Aufar : The Power Of Proof Witness Statements And
237410101020 Confirmation Of The Defendant's Rights In A Public
Criminal Trial Through Virtual Court (A Studi At The
Jantho District Court - District Of Aceh Besar)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. dan Dr. Yusrizal,
S.H., M.H.)**

Carrying out criminal trials using virtual means is to keep up with developments in society and to realize the effectiveness of criminal trials in the digital era. Therefore, the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court is one answer to this need. However, in fact, in carrying out virtual trials, various technical and juridical obstacles were found.

This research aims to analyze the extent of the evidentiary strength of witness testimony and the fulfillment of the defendant's rights when trials are held via virtual means as well as what obstacles and obstacles are experienced by the Panel of Judges, Public Prosecutors, Lawyers and Defendants at the Jantho District Court.

The method used in this research is a juridical-empirical research method, namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the Jantho District Court research location. To complete this research, a literature review was also carried out.

The research results show that virtual trials cannot be carried out perfectly as stipulated in PERMA Number 4 of 2020, in the implementation of electronic trials there is still a lack of evidentiary strength of witness statements and the defendant's rights are not fulfilled as stipulated in the Criminal Procedure Code. In conclusion, in the implementation of virtual trials, various problems were found, including juridical-procedural obstacles and juridical-substantive obstacles which focused on the principles of due process of law which had not been fulfilled in virtual trials. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies propose to the government to create a Perppu that can regulate virtual criminal trials.

Keywords: *Temporary suspension, ASN discipline, bureaucratic reform, Bireuen Regency.*